

BAB III

KRONOLOGI GERAKAN MAHASISWA INDONESIA TAHUN 2014-2019

Pada periode 2014-2019, gerakan mahasiswa menjadi lebih aktif menghadapi isu-isu pemerintahan yang kontroversial. Seratus hari pertama pemerintahan Joko Widodo yang mulai menjabat pada 20 Oktober 2014 bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, memicu kritik dan demonstrasi karena beberapa kebijakan yang dianggap kontroversial.⁸⁴ Salah satunya adalah pencalonan Budi Gunawan, yang tersandung kasus korupsi, sebagai Kapolri pada Januari 2015. Publik memandang hal ini sebagai politik “balas jasa” karena Budi merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri, ketua PDI-P.

Protes semakin memanas akibat konflik antara KPK dan Polri, termasuk penangkapan wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto, yang dianggap sebagai upaya melemahkan KPK. Kebijakan kontroversial lainnya adalah kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi bahan bakar untuk mengalihkan anggaran ke infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

3.1 Demonstrasi Kenaikan BBM

Gerakan mahasiswa menjadi salah satu kekuatan utama dalam menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam nilai-nilai demokrasi. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memainkan peran sentral

⁸⁴ Qorib dan Waru, Identitas Jokowi dalam Pelantikan Presiden Periode 2014 & 2019 di Televisi, *Communicator Sphere*, 2(1), 2022, hlm. 1-19.

sebagai koordinator aksi nasional, menggalang mahasiswa dari berbagai universitas untuk turun ke jalan. Pada November 2014, BEM SI mengorganisir demonstrasi besar di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk memprotes kenaikan harga BBM. Aksi ini melibatkan mahasiswa dari UI, Universitas Trisakti, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dan beberapa organisasi kepemudaan (OKP) seperti IMM, HMI, PMKRI, GMNI, Elemende, dan lainnya. Mahasiswa UI, melalui BEM UI, menjadi penggerak utama di Jakarta dengan menggelar orasi lebih dulu dan membawa spanduk bertuliskan “Tolak Kenaikan BBM” di depan stasiun UI meskipun hal ini berakhir tanpa respon dari pemerintah.



gambar 3. 1 Demo kenaikan BBM

Sumber: Tangerang (2014) – Tempo.co, diakses 26 April 2025

Di luar Jakarta, gerakan mahasiswa juga bergelora di kota-kota pelajar seperti Solo dan Kudus. Gabungan mahasiswa dari berbagai kampus di Solo menggelar aksi saat pelantikan Jokowi sebagai presiden di Bundaran Gladag. Selain itu, di Kudus, puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga turut melakukan aksi unjuk rasa menurunkan harga BBM dengan melakukan long

march dari alun-alun Kudus menuju gedung DPRD Kudus sembari membawa spanduk, poster, hingga menuntun sepeda motor sebagai simbolis penolakan kenaikan BBM.



gambar 3. 2 Demo mahasiswa

Sumber: Solo – Detiknews/Muchus BR, diakses 26 April 2025

Selain melakukan demonstrasi, mahasiswa juga melakukan protes dengan cara beraudiensi dengan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR). Pengurus Pusat Komunitas Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diwakili Sekretaris Jenderal PP KAMMI Ardhi Rahman, Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Adhe Nuansa Wibisono dan beberapa personel PP KAMMI lainnya. Mereka menemui anggota DPR yang juga pengamat minyak dan gas dari *Center for Petroleum and Energy Economics Studies*, Kurtubi. Meskipun begitu, PP KAMMI sendiri menyatakan sikap penolakan atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan, mereka menginstruksikan seluruh kadernya di Tanah Air menggelar aksi demonstrasi selama sebulan penuh.



gambar 3. 3 Audiensi KAMMI dengan DPR

Sumber: Okezone.com, diakses 26 April 2025

3.2 Aksi Peringatan 18 Tahun Reformasi

Aksi demonstrasi pada pemerintahan Joko Widodo berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada awal tahun 2015, tepatnya pada tanggal 8 Januari 2015, Aksi Kamisan pertama pada tahun itu dimulai. Keluarga korban pelanggaran HAM memulai aksi diamnya di depan Istana Merdeka dengan menggunakan payung hitam sebagai simbol dari Aksi Kamisan ini.

Aksi Kamisan sendiri telah dilakukan sejak 18 Januari 2007, secara resmi dinamakan sebagai Aksi Diam (2007) sebagai salah satu kegiatan paguyuban Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK).⁸⁵ Kemudian masyarakat yang menyaksikan aksi, menyebutnya secara populer sebagai Aksi Payung Hitam (2007), Aksi Payung Hitam Kamisan (2015), dan Aksi Kamisan (2016-sekarang). Hal tersebut terjadi karena setiap melakukan aksi di Taman Aspirasi

⁸⁵ Yudistira Husodo, Sejarah Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007–2021, dalam Jurnal Ceteris Paribus, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 1-10.

atau Jl. Silang Monas Barat Laut yang tepat di seberang Istana Merdeka/Istana Presiden, Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, para peserta aksi selalu membawa payung hitam sebagai maskot atau simbol perjuangan. Payung dianggap sebagai pelindung fisik atas hujan dan terik matahari, dan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan perlindungan Illahi.

Memasuki pertengahan tahun 2015, tepatnya pada 20-21 Mei 2015, mahasiswa kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan. Aksi demonstrasi ini diikuti oleh perwakilan dari 20 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia yang dikoordinatori langsung oleh BEM SI. Aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Peringatan 18 Tahun Reformasi. Isu-isu yang diangkat dalam aksi ini diantaranya adalah revisi UU Minerba pesanan asing, nasionalisasi aset negara, lakukan reformasi agraria dan stop impor beras dan utang luar negeri.

Aksi unjuk rasa di depan Istana Negara ini berlangsung panas. Selain diwarnai melakukan aksi bakar ban, bakar pocong dan menutup jalan di depan Istana Negara, massa juga sempat terlibat aksi dorong-dorongan dengan petugas keamanan. Aksi bakar pocong dilakukan sebagai simbol korban pemberi harapan palsu (PHP) Jokowi-JK. Pembakaran ini dilakukan di samping keranda mayat, kemudian dikelilingi oleh puluhan mahasiswa. Sambil mengelilinginya, mahasiswa bernyanyi dan mengejek Jokowi sebagai presiden gagal dan presiden PHP.



gambar 3. 4 Aksi BEM-SI di Istana Negara (2015)

Sumber: [Liputan6.com/Yoppy Renato](http://Liputan6.com/Yoppy%20Renato), diakses 26 April 2025

Memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, lebih dari 2.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2015. Aksi ini tidak hanya unjuk rasa, tetapi juga mencakup “Sidang Rakyat” sebagai wujud sikap kritis mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2015.

Koordinator pusat BEM-SI menyatakan, Sidang Rakyat digelar untuk mengevaluasi konsistensi pemerintahan Jokowi-JK dengan janji kampanye mereka, terutama soal ekonomi pro-rakyat. Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan ekonomi malah merugikan “wong cilik” dan gagal memenuhi harapan rakyat. Kebijakan yang disorot termasuk kenaikan harga BBM pada November 2014, yang memicu protes karena membebani masyarakat kecil, serta minimnya kemajuan dalam reforma agraria dan kesejahteraan petani.

Aksi ini diikuti mahasiswa dari 57 kampus negeri dan swasta di berbagai daerah. Kampus yang terlibat antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh

Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Negeri Lampung (Unila), Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Politeknik Negeri Jakarta, dan Sekolah Tinggi Teknik PLN.

3.3 Aliansi Mahasiswa dan Buruh

Pada 1 Mei 2016, bertepatan dengan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, gerakan mahasiswa bergabung dengan kelompok buruh dalam aksi demonstrasi di Surabaya dan Jakarta. Aksi ini menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengupahan. Di Surabaya, ratusan mahasiswa dari organisasi seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), BEM KM Universitas Airlangga, Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) berunjuk rasa bersama Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) di depan Gedung Negara Graha, Jalan Gubernur Suryo.



gambar 3. 5 Aksi May Day, Jakarta (2016)

Sumber: Liputan6.com/Angga Yuniar, diakses 26 April 2025

Sementara itu, di Jakarta, demonstrasi serupa digelar oleh massa buruh, petani, nelayan, dan mahasiswa di depan Istana Negara dengan tuntutan yang sama. Namun, aksi pada awal Mei tersebut tidak mendapat tanggapan memadai dari pemerintah. Akibatnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merencanakan demonstrasi lanjutan pada akhir Oktober hingga awal November 2016, dengan melibatkan kelompok massa yang sama.

3.4 Demonstrasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Di awal tahun berikutnya, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi. Sebanyak 200 mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS), BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Solo Raya menuntut pemerintah Jokowi mencabut kenaikan BBM, listrik, STNK, BPKB. Selain itu, mereka meminta pemerintah membatalkan kenaikan BBM non subsidi dan mengembalikan subsidi Listrik 900 V. Aksi ini dilakukan dengan cara melakukan long march dari Bundaran Gladak menuju Balaikota Solo dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian.



gambar 3. 6 Demo kenaikan harga, Solo (2017)

Sumber: Panjimas.com, diakses 26 April 2025

Aksi demonstrasi semakin memanas pada akhir Oktober 2017. Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dicap mendapatkan rapor merah karena kebijakan-kebijakannya yang dianggap semakin tidak memihak rakyat kecil. Aksi unjuk rasa peringatan 3 tahun Jokowi-JK dilakukan di tiga titik utama yaitu di Jalan Silang Monas, Istana Merdeka, dan gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Massa demonstrasi terdiri dari ratusan mahasiswa diikuti dengan buruh hingga awak Pertamina dengan beragam tuntutan, seperti pembatalan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Ormas hingga penuntutan pemberian hak kepada Pegawai BUMN. Beberapa organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini diantaranya adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan organisasi lainnya.



gambar 3. 7 Spanduk tuntutan tiga tahun Jokowi-JK

Sumber: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan, diakses 26 April 2025

Aksi demonstrasi ini berakhir ricuh hingga beberapa demonstran terutama koordinator BEM SI ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan surat panggilannya, kepolisian menggugat Wildan (koordinator BEM SI) atas tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum, perusakan secara bersama-sama, serta kejahatan terhadap kekuasaan umum. Selain Wildan, Polda Metro Jaya juga menyeret tiga peserta aksi Tiga Tahun Jokowi yang diantaranya adalah Panji Laksono, (Presiden Mahasiswa IPB), Ardi S (mahasiswa IPB) dan Ihsan M (mahasiswa STEI SEBI).

3.5 Aksi Tolak UU MD3

Memasuki awal tahun 2018, gerakan mahasiswa semakin memanas karena isu pengesahan revisi Undang-Undang MD3 pada pertengahan Februari 2018. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang lebih dikenal sebagai UU MD3 adalah UU yang mengatur wewenang, tugas, hak, kewajiban, dan kode etik anggota lembaga legislatif di Indonesia. Revisi UU MD3 pada tahun 2018, yang disahkan DPR pada 12 Februari 2018, memicu kontroversi besar karena dianggap mengandung pasal-pasal yang berpotensi melemahkan demokrasi dan membungkam kritik masyarakat.

Masyarakat sipil dan mahasiswa pun melancarkan aksi demonstrasi dari akhir februari hingga maret 2018 di berbagai kota besar di Indonesia. Tercatat pada 21 Februari 2018, aksi massa yang terdiri dari sejumlah organisasi kemahasiswaan di Jombang melakukan long march dari Taman Kebonrojo menuju kantor DPRD Jombang di Jalan Wahid Hasyim No 110. Selain di Jombang, mahasiswa juga melakukan penutupan jalan di depan DPRD Surabaya

pada akhir Februari 2018.

Pada awal Maret 2018, di Medan dan Bengkulu juga terjadi aksi demonstrasi mahasiswa hingga menyebabkan kericuhan yang berakhir dengan penangkapan beberapa mahasiswa di Bengkulu oleh aparat kepolisian. Sementara itu, massa demonstrasi di Jakarta mulai menyuarakan protes ini pada pertengahan Maret 2018 dengan melakukan demonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Massa demonstrasi ini terdiri dari beberapa badan eksekutif mahasiswa (BEM) wilayah jabodetabek dan warga sipil yang tergabung dalam Presidium Rakyat Menggugat.



gambar 3. 8 Demo tolak UU MD3, Jakarta (2018)

Sumber: Tempo/Subekti, diakses 26 April 2025

Selain melakukan demonstrasi secara langsung, massa demonstran juga melakukan penandatanganan petisi daring di Change.org dengan tajuk, “Tolak revisi UU MD3, DPR tidak boleh mempidanakan kritik!”. Petisi ini ditandatangani oleh lebih dari 203.000 orang. Petisi ini menunjukkan penolakan luas dari masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap antidemokrasi.

Organisasi masyarakat sipil, seperti Forum Kajian Hukum dan Konstitusi

(FKHK) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal Maret 2018. Disusul oleh dua mahasiswa Universitas Indonesia, Zico Leonard dan Josua Satria, juga mengajukan gugatan serupa, menandakan keterlibatan generasi muda dalam melawan revisi ini. Protes mengenai UU MD3 ini pada akhirnya mendapatkan respon dari MK pada Juni 2018. MK membatalkan beberapa pasal kontroversial, termasuk yang berkaitan dengan kriminalisasi kritik terhadap DPR, karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Demonstrasi mahasiswa kembali terjadi pada peringatan hari buruh dan hari pendidikan nasional (1-2 Mei). Pada hari buruh, mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), ikut menyuarakan tuntutan buruh terkait upah layak, kondisi kerja, dan penghapusan regulasi yang dianggap merugikan pekerja.

Selanjutnya, pada hardiknas, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Aksi ini menyuarakan 4 tuntutan utama yaitu jaminan wajib belajar 12 tahun dengan payung hukum yang jelas, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945, penolakan student loan yang dianggap membebani mahasiswa pasca-kelulusan, dan revisi UU Pendidikan Tinggi terkait otonomi pengelolaan perguruan tinggi.



gambar 3. 9 Demo student loan, Hardiknas (2018)

Sumber: [Viva.co.id/Alika Noor Kholifah](http://Viva.co.id/Alika%20Noor%20Kholifah), diakses 26 April 2025

3.6 Gelombang Aksi Reformasi Dikorupsi

Gerakan mahasiswa terus menunjukkan konsistensinya hingga tahun 2019. Ketegangan yang mulai terasa sejak tahun-tahun sebelumnya tidak mereda begitu saja. Tahun 2019 menjadi lanjutan sekaligus titik krusial dari gerakan mahasiswa yang semakin lantang menyuarakan kritiknya. Gerakan mahasiswa memuncak pada pertengahan September 2019, gelombang unjuk rasa mahasiswa merebak di berbagai wilayah Indonesia, dipicu oleh penolakan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontroversial termasuk revisi UU KPK yang dianggap menghambat upaya pemberantasan korupsi, serta RUU seperti RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan.

Aksi bermula pada 19 September di depan Gedung DPR/MPR/DPD di Jakarta, melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti UI, ITB, dan Universitas Tarumanegara. Demonstrasi ini mencerminkan kekecewaan terhadap DPR yang dinilai mengesampingkan aspirasi rakyat demi kepentingan politik tertentu.



gambar 3. 10 Ricuh demo tolak RUU bermasalah, DPR (2019)

Sumber: Tempo/Hilman Fathurrahman, diakses 26 April 2025

Pada 23 September, protes semakin meluas, ditandai dengan aksi #GejayanMemangil di Sleman, Yogyakarta, yang memperkenalkan gaya demonstrasi unik dengan spanduk berisi pesan-pesan jenaka. Ribuan mahasiswa dari kampus seperti UGM dan Universitas Sanata Dharma berkumpul di Simpang Tiga Colombo, menuntut pencabutan UU KPK serta penolakan RUU yang dianggap tidak prorakyat. Aksi serupa bergema di kota-kota lain seperti Palembang, Makassar, Aceh, dan Medan, dengan sasaran utama gedung DPRD daerah. Di Aceh, mahasiswa juga menyuarakan keprihatinan terhadap kabut asap yang menyengsarakan masyarakat.

Sayangnya, sejumlah aksi berujung ricuh. Di Medan, polisi mengerahkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mencoba menerobos barikade. Tragedi terburuk terjadi di Kendari pada 26 September, ketika dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Randi dan Yusuf Kardawi, tewas akibat luka tembak dan pukulan benda tumpul. Seorang warga bernama Putri juga terkena peluru nyasar di rumahnya. Tercatat, 232 orang luka-luka akibat kericuhan di berbagai daerah,

dengan 88 korban di Jakarta dan 101 di Bandung. Kekerasan aparat, termasuk penganiayaan terhadap mahasiswa dan wartawan, turut mencuat dalam peristiwa ini.



gambar 3. 11 Aksi Kamisan “Reformasi Dikorupsi”, Malang (2019)

Sumber: Antara/Ari Bowo Sucipto, diakses 26 April 2025

Selain di jalanan, aksi mahasiswa juga ramai di media sosial, yang dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan mengkoordinasikan gerakan. Mereka menyuarakan tujuh tuntutan utama, termasuk penolakan RUU bermasalah, pembatalan UU KPK, hingga isu HAM dan lingkungan seperti kriminalisasi aktivis dan kebakaran hutan. Meski DPR minim memberikan tanggapan, semangat mahasiswa tetap membara. Namun, aksi ini juga diwarnai hoaks, seperti kabar palsu tentang kematian demonstran, yang memperkeruh situasi. Gelombang demonstrasi ini mencerminkan semangat reformasi yang kuat, namun juga mengungkap ketegangan antara aspirasi masyarakat dan respons pemerintah serta apara